

## Masjid Agung Kota Bogor Bisa Dipakai Ibadah Mulai Desember 2022

**BOGOR (IM)-** Wali Kota Bogor, Bima Arya meninjau progres pembangunan lanjutan Masjid Agung di Jalan Dewi Sartika, Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa (2/8). Bima Arya optimis Masjid Agung yang bisa menampung 5.000 jemaah ini bisa dipakai warga untuk beribadah pada Desember 2022.

Dalam peninjauannya itu, Bima Arya mengumpulkan para pekerja, kontraktor serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor. Selain memberikan arahan, Bima Arya juga mengajak untuk melakukan doa bersama.

“Pembangunan Masjid Agung Bogor kembali berlanjut. Di tahap tahun ini dan akan tuntas per 6 Desember 2022. Sudah bisa digunakan untuk tempat ibadah di lantai utama. Total bisa 5.000 jemaah secara keseluruhan, tetapi di lantai utama saja sekitar 4.000 jemaah,” ungkap Bima Arya, kemarin.

Bima meminta kepada

kontraktor Masjid Agung untuk memaksimalkan jumlah pekerja dan memastikan material tersedia.

“Saya titip supaya betul-betul dikerjakan dengan kualitas yang baik. Semua harus atensi, Kadis PUPR, Camat untuk memonitor terus supaya jika ada persoalan teknis bisa segera kita antisipasi,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Chusnul Rozaqi mengatakan, kegiatan yang akan dikerjakan dalam proyek Masjid Agung Bogor hingga Desember 2022 adalah toilet di sisi barat, penguatan struktur lantai, finishing lantai utama, interior dan mihrab.

“Tahapan berikutnya adalah pengerjaan plafon, catwalk atas, granit. Mudah-mudahan 6 Desember selesai tepat waktu. Bagian atas atau mezzanine baru sampai railing dan interior. Lantai belum. Dilanjut berikutnya,” pungkasnya. ● **gio**

ORANG DALAM TERLIBAT CALO SERTIFIKAT BODONG

## Kepala BPN Bogor Bakal Sapu Bersih Oknum yang Ikut Bermain

**BOGOR (IM)-** Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor membeberkan langkah-langkah para calo terbitkan sertifikat palsu alias bodong.

“Ini adalah konsen kami dari Gugus Tugas Kabupaten, kami akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanahan yang ada di Kabupaten Bogor dan bertekad akan melaksanakan kegiatan bersih-bersih terhadap siapapun yang bermain, untuk modus operandinya mereka (calo) bisa masuk ke dalam sistem dengan cara menggunakan akun oknum pegawai BPN Kabupaten Bogor,” ungkap Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor, Yan Septadyas, Rabu (3/8).

Kemudian, kata Dyas, pihaknya terus berupaya membenahi keamanan secara internal dengan cara setiap pemegang akun wajib melakukan pengawasan dan pengendalian. Setiap pegawai BPN yang memiliki akun minimal satu minggu sekali mengganti passwordnya.

Karena, menurutnya, akun-akun yang dapat mengakses ke situs BPN bersifat personal karena jabatannya.

“Tetapi karena tadi dia melaksanakan tugas dua tempat di kantor dan di lapangan sebagai ketua tim, jadi yang di lapangan dipercayakan kepada pelaksana, tetapi karena kelalaiannya, dia memperkirakan terlalu berlebihan sehingga mengadakan kom-

promi,” paparnya.

Menurut pria yang dilantik menjadi Kakan BPN Kabupaten Bogor pada Juni 2022 ini, karena kemudahan yang didapat para calo dari hasil kompromi dengan oknum pegawai BPN dalam kurun waktu 3 jam para pelaku tersebut sudah bisa masuk di dalam sistem milik BPN.

Dyas mengatakan, kepada oknum pegawai BPN bernisial DK (49), pihaknya bisa mengajukan pemberhentian kerja setelah ada hasil putusan yang menyebutkan pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi dan dipidana minimal 18 bulan.

“Jadi begini, ini produk PTSL ada sebagian yang kami namakan residu, karena ini ada berkasnya dari sisa program tahun anggaran kerja 2017-2018 dan berkasnya belum lengkap jadi belum diambil, sertifikatnya terbit tahun 2017, tapi belum dibagikan,” paparnya.

Dengan adanya residu tersebut, para calo ini memanfaatkan kesempatan saat ada orang lain yang meminta bantuan untuk membuat sertifikat tanah.

“Kemudian ada orang mohon di tahun 2022, sedangkan sertifikat 2017-2018, yang diubah cuma detail secara besar aja tapi tahunnya tidak di rubah, makanya kami menghadi kick off BIAN tahap II se-Jawa dan Bali di RSUD Karawang, Kabupaten Karawang, Rabu (3/8). Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin.

Kadisdik dan Gubernur pun meninjau pelaksanaan imunisasi yang digelar di RSUD Karawang dan Posyandu Sakura 10 Puskesmas Telukjambe, Karawang.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mendukung penuh program BIAN sebagai upaya mewujudkan SDM Jabar yang sehat. “Di masa depan, 25 tahun dari sekarang Indonesia akan jadi negara adidaya. Salah satu syaratnya adalah SDM anak cucu kita harus jadi generasi yang produktif, kompetitif, dan sehat,” tuturnya.

Gubernur menilai pentingnya imunisasi bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. “Jadi, urusan stunting dan penyakit yang punya potensi menular ke anak-anak harus kita cegah, itu pentingnya imunisasi,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Konsumer dan Ritel Bank Bjb, Suartini mengatakan, melalui program DPLK ini, pihaknya berusaha berperan untuk kesejahteraan P3K di Jabar. “Kami hadir untuk itu,” jelasnya.

Rencananya, sosialisasi program DPLK bagi P3K guru Jabar ini akan dilakukan pada 4 - 9 Agustus 2022 di masing-masing kacamatan yang bekerja sama dengan kantor cabang Bank bjb di kabupaten/kota.

Kepala Kacamatan Wilayah XI, Aang Karya Karyana pun mengaku telah berkoordinasi untuk melaksanakan sosialisasi program DPLK ini dengan Bank bjb cabang Garut. “Sosialisasi akan dilakukan pada 4 Agustus,” ujarnya.

Aang menjelaskan, rencananya bukan hanya ASN P3K yang akan mengikuti program DPLK tersebut, tapi juga PNS atau tenaga honorer di sekolah. “Tapi karena ada regulasi baru, kita akan lihat situasinya dulu,” pungkasnya. ● **Iys**

# 8 | Nusantara



IDN/ANTARA

## BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL DI JAWA BARAT

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Measles and Rubella (MR) kepada seorang anak di Posyandu Bougenville, Pemanca, Depok, Jawa Barat, Rabu (3/8). Pemprov Jawa Barat mengajak orang tua yang memiliki balita untuk berpartisipasi dalam Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) 2022 selama bulan Agustus 2022 ini.

# Pemkot Tata Kawasan Tugu Kujang Jadi Bundaran HI Kota Bogor

Saat ini semakin banyak kebutuhan warga untuk ruang publik yang dimanfaatkan untuk berolahraga dan aktivitas lainnya. Namun rencana ini memerlukan kerja sama semua pihak, mulai dari Dinas Koperasi UKM Dagin, Dinas PUPR, dan Disperumkim untuk menyusun desainnya bersama-sama, kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto.

**BOGOR (IM)-** Ruang publik atau public space di Kota Bogor terus dibenahi. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana menata kawasan Tugu Kujang, Tepas

Salapan Lawang Dasakerta hingga area Botani Square secara terintegrasi.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan rencana penataan itu berawal dari kebutuhan revitalisasi Tugu Kujang karena ada beberapa bagian yang sudah dimakan usia.

“Untuk itu kami melakukan perencanaan, tetapi saya berpikir bahwa sebaiknya dilakukan perencanaan yang terintegrasi dengan kawasan ini, karena dulunya ketika didirikan lebih kepada untuk landmark Tugu Kujang,” kata Bima Arya dalam keterangannya, Rabu (3/8).

Di sisi lain, menurut dia,

saat ini semakin banyak kebutuhan warga untuk ruang publik yang dimanfaatkan untuk berolahraga dan aktivitas lainnya. Terlebih, pengaturan lalu lintas juga harus diatur agar lebih efektif, karena di jalan Otto Iskandardinata atau Otista ini satu sumber kemacetan.

“Di perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun ini kita akan buat konsep perencanaan yang terintegrasi. Tugu Kujang, Lawang Salapan, Botani itu akan terintegrasi. Ini akan menjadi seperti Bundaran HI Kota Bogor,” ujarnya.

Namun, Bima Arya beranggapan rencana ini memerlukan kerja sama semua, mulai

dari Dinas Koperasi UKM Dagin, Dinas PUPR, dan Disperumkim untuk menyusun desainnya bersama-sama.

“Jadi di sini jangan sampai jadi kawasan kumuh, nongkrong boleh tetapi tidak melanggar aturan dan menjaga kebersihan, karena itu harus diatur dan harus difasilitasi. Nanti ada tempat duduk yang nyaman,” tuturnya.

Pihaknya menargetkan desain penataan ini akan rampung pada tahun ini dan pengerjaan revitalisasi tahun depan. “Kita akan koordinasi dengan BRIN, IPB University, Botani Square. Kita akan ajak semua, kami masih susun konsepnya,” kata Bima Arya. ● **gio**

## BIAN Tahap II, Jabar Targetkan 6,1 Juta Dosis Imunisasi

**BANDUNG (IM)-** Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar) selaku Wakil Ketua I Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Jabar, Dedi Supandi bersama Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menghadiri kick off BIAN tahap II se-Jawa dan Bali di RSUD Karawang, Kabupaten Karawang, Rabu (3/8).

Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin.

Kadisdik dan Gubernur pun meninjau pelaksanaan imunisasi yang digelar di RSUD Karawang dan Posyandu Sakura 10 Puskesmas Telukjambe, Karawang.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mendukung penuh program BIAN sebagai upaya mewujudkan SDM Jabar yang sehat. “Di masa depan, 25 tahun dari sekarang Indonesia akan jadi negara adidaya. Salah satu syaratnya adalah SDM anak cucu kita harus jadi generasi yang produktif, kompetitif, dan sehat,” tuturnya.

Gubernur menilai pentingnya imunisasi bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. “Jadi, urusan stunting dan penyakit yang punya potensi menular ke anak-anak harus kita cegah, itu pentingnya imunisasi,” tegasnya.

Pada kesempatan ini Kang

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, menekankan pentingnya imunisasi agar di masa mendatang mereka menjadi generasi yang kompetitif dan sehat. Selain itu, ia juga mengingatkan, 70 persen warga Indonesia di masa mendatang adalah anak-anak muda.

“Di masa depan, 25 tahun dari sekarang, Indonesia itu akan menjadi negara Adidaya. Tahun 1945 Indonesia merdeka, 2045 menjadi negara adidaya. Salah satu syaratnya, SDM-nya dari anak cucu kita harus menjadi generasi yang produktif, kompetitif dan sehat,” tegasnya.

Kang Emil juga berharap seluruh masyarakat Indonesia bergerak bersama dalam menyukseskan Bulan Imunisasi Anak Nasional ini demi mencegah tengkes (stunting) dan penyakit yang berpotensi menular ke anak-anak.

“Memberantas stunting sangat penting. Oleh karena itu, urusan stunting dan penyakit menular yang berpotensi ke anak-anak harus kita cegah. Itulah mengapa pentingnya imunisasi,” ujarnya.

Adapun imunisasi yang mesti dilakukan, yakni Campak dan Rubella, dan Imunisasi Kejar, Polio dan DPT. Ditargetkan untuk anak-anak di Jawa Barat yang mengikuti imunisasi Campak - Ru-

bella 3,4 juta anak. Sedangkan untuk Imunisasi Kejar ditargetkan 4,09 juta anak.

“Kita doakan pelaksanaan imunisasi lancar agar generasi baru ini semuanya menjadi orang yang bermanfaat dan hebat,” ucapnya.

Adapun untuk tempat pelayanan imunisasi dibuka di rumah sakit, Puskesmas, klinik, TK dan PAUD, hingga Posyandu.

“Di mana ada anak-anak usia 9 bulan sampai 58 bulan, kita targetkan harus selesai diimunisasi dalam waktu bulan Agustus ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Asisten Daerah I sekaligus Ketua Umum Pokja BIAN Jabar, Dewi Sartika menjelaskan, target imunisasi di Jabar adalah 6,1 juta dosis, terbanyak dari provinsi se-Indonesia. Antara lain, target campak rubela sebanyak 3,36 juta, injeksi polis 2 juta, tetes polis 690 ribu, dan pentaboa 148 ribu.

“Jabar siap melaksanakan semua kegiatan BIAN dengan pos pelayanan terbesar, yakni di 1.111 puskesmas, 393 rumah sakit, 86 TK, 12.057 kelompok belajar, 117 TPA, dan 9.926 PAUD sejenis,” tuturnya.

Hadir pula Bupati Karawang, Cellica Nurachadiana, sejumlah anggota DPRD Jawa Barat, perwakilan Kemendagri, juga dari Forkompinda Karawang. ● **Iys**

## Guru P3K Jabar akan Miliki Dana Pensiun



IST

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Dedi Supandi telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) DPLK bersama Bank bjb di Lounge Bank bjb, Jln. Naripan No. 12-14, Kota Bandung, Selasa (2/8).

**BANDUNG (IM)-** Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Jawa Barat (Jabar) akan memiliki dana pensiun melalui program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Dedi Supandi telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) DPLK bersama Bank bjb di Lounge Bank bjb, Jln. Naripan No. 12-14, Kota Bandung, Selasa (2/8).

“Ini adalah jawaban aspirasi mereka (P3K). Perbedaan P3K dengan PNS itu enggak punya dana pensiun. Maka, kita hadirkan solusi, ini bagian persiapan mereka (menghadapi masa pensiun nanti),” ujar Kadisdik.

Nantinya, lanjut Kadisdik, secara teknis, sosialisasi program tersebut akan dilakukan oleh kantor cabang dinas pendidikan (kacamatan). “Teknisnya berada di tata usaha cabang dinas,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Konsumer dan Ritel Bank Bjb, Suartini mengatakan, melalui program DPLK ini, pihaknya berusaha berperan untuk kesejahteraan P3K di Jabar. “Kami hadir untuk itu,” jelasnya.

Rencananya, sosialisasi program DPLK bagi P3K guru Jabar ini akan dilakukan pada 4 - 9 Agustus 2022 di masing-masing kacamatan yang bekerja sama dengan kantor cabang Bank bjb di kabupaten/kota.

Kepala Kacamatan Wilayah XI, Aang Karya Karyana pun mengaku telah berkoordinasi untuk melaksanakan sosialisasi program DPLK ini dengan Bank bjb cabang Garut. “Sosialisasi akan dilakukan pada 4 Agustus,” ujarnya.

Aang menjelaskan, rencananya bukan hanya ASN P3K yang akan mengikuti program DPLK tersebut, tapi juga PNS atau tenaga honorer di sekolah. “Tapi karena ada regulasi baru, kita akan lihat situasinya dulu,” pungkasnya. ● **Iys**



IST

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar) selaku Wakil Ketua I Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Jabar, Dedi Supandi bersama Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menghadiri kick off BIAN tahap II se-Jawa dan Bali di RSUD Karawang, Kabupaten Karawang, Rabu (3/8).

## Komisi III DPRD Kota Bogor Minta Pemkot Cepat Tangani Bencana

**BOGOR (IM)-** Komisi III DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja membahas evaluasi penanganan bencana di Kota Bogor. Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor diminta agar bergerak cepat dan tepat dalam penanganan bencana.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto, menjelaskan penanggulangan bencana di Kota Bogor sudah diatur di dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sehingga, Komisi III DPRD Kota Bogor menindaklanjutinya dengan melakukan evaluasi dan monitoring.

Berdasarkan hasil rapat dengan mitra kerja, Iwan secara tegas meminta Pemerintah Kota Bogor untuk segera melakukan pembaruan pemetaan daerah rawan bencana, penyelenggaraan penanganan bencana yang terpadu, serta penyelesaian pasca bencana.

“Jadi dengan adanya dua aliran sungai besar di Kota Bogor (Ciliwung dan Cisadane), maka perlu adanya keterbaruan pemetaan daerah rawan bencana, kalau kita berkaca di kasus yang terjadi di Kelurahan Curug,” ujar

Iwan dalam keterangan yang diterima, Rabu (3/8).

Tak hanya itu, penanganan bencana di Kota Bogor juga harus cepat dan tepat, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, sambung Iwan, maka kehadiran BPBD dan organisasi lainnya yang bergerak dibidang kebencanaan perlu lebih ditingkatkan lagi.

“Sehingga saat terjadi bencana itu, BPBD, Tagana, FPRB bisa bergerak cepat karena semuanya terintegrasi di satu sistem atau aplikasi yang ada, agar penanganannya cepat,” ujar Iwan.

Sedangkan untuk penanggulangan pasca-bencana, Iwan berharap birokrasi pengurusan anggaran Bantuan Sosial Tidak Terduga (BSTT) bisa dipermudah lagi. Sebab, warga yang terdampak bencana tentunya perlu bantuan yang cepat untuk menutupi kebutuhannya.

“Jadi untuk kondisi pasca bencana, rekomendasi dari kelurahan dan dinas terkait dengan ditunjang SK bencana maka anggaran BSTT itu bisa segera digunakan agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya. ● **gio**

## Meski Belum Ditemukan, Masyarakat Diminta Tetap Waspada Cacar Monyet

**BANDUNG (IM)-** Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung meminta masyarakat tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) serta sehat, meski penyakit cacar monyet yang tengah merebak di dunia saat ini belum ditemukan di Kota Bandung.

“Jadi, untuk kasus cacar monyet sampai dengan sekarang belum ada dilaporkan penyakit cacar monyet. Tapi tetap, kita harus meningkatkan kewaspadaan,” kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Bandung Ira Dewi Anjani, Rabu (3/8).

Ira Dewi Anjani kembali mengingatkan, bahwa masyarakat diminta untuk tetap waspada dan menerapkan perilaku bersih dan sehat. Selain itu harus sering mencuci tangan dan menerapkan protokol kesehatan (prokes). “Untuk masyarakat harus curiga ke cacar monyet, kalau ada demam tinggi dan ada timbul bintik-bintik berisi air dan di seluruh tubuh merah panas. Kalau sudah begitu segera ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lain sehingga dapat diobati,” ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah mendukung upaya penguatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit cacar monyet atau monkeypox. Pasalnya, penyakit tersebut sudah menyebar di banyak negara termasuk di kawasan Asia. ● **pur**